

PRESIDEN PRABOWO PERANGI TAMBANG ILEGAL



Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mendeklarasikan perang terbuka terhadap tambang ilegal. Langkah ini menyusul laporan yang diterima Presiden mengenai masifnya aktivitas pertambangan ilegal dan praktik penyelundupan timah. Tambang ilegal juga terjadi di berbagai sektor, mulai dari timah, nikel, batu bara, hingga emas. Presiden Prabowo memerintahkan TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk menggelar operasi besar-besaran, guna menutup jalur penyelundupan timah yang ditambang secara ilegal dari 1.000 lokasi penambangan di Bangka Belitung yang merugikan negara hingga puluhan triliun, Senin (29/9/2025). Presiden Prabowo menyoroti data yang mengejutkan, di mana terdapat laporan 1.000 lebih tambang ilegal yang teridentifikasi beroperasi dan berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga Rp22 triliun pada periode September-Desember 2025 bahkan Rp45 triliun sampai tahun 2026. Prabowo juga menyebutkan selama ini para penyelundup itu menggunakan berbagai siasat, untuk mengeluarkan hasil timah dari tambang-tambang ilegal ke luar Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Diantaranya menggunakan perahu-perahu kecil, sampai dengan kapal-kapal penumpang seperti kapal ferry.

Sejumlah kapal ponton isap melakukan penambangan biji timah ilegal di perairan Teluk Kelabat Dalam, Belinyu, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. (antara)

Potensi Kerugian Tambang Ilegal

Timah di Bangka Belitung

- Terdapat sekitar 1.000-1.063 titik tambang ilegal.
- Hampir 80% hasil timah diselundupkan ke luar daerah menggunakan kapal kecil hingga ferry.
- **Potensi kerugian negara:**
 - Rp22 triliun (September-Desember 2025).
 - Rp45 triliun (tahun 2026).

Kerugian Historis 2015-2022

(Kasus Tata Kelola Timah di Babel)

- **Total kerugian negara:**
 - Rp300 triliun.**
 - Rinciannya:
 - Rp271 triliun berupa kerugian lingkungan (kerusakan hutan & non-hutan).

PRESIDEN RELIASIKAN 26 RIBU RUMAH SUBSIDI FLPP

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menghadirkan rumah layak huni bagi rakyat kecil sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Buktinya, Kepala Negara merealisasikan 26 ribu dari target 25 ribu Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Presiden secara langsung meresmikan akad massal 26 ribu KPR FLPP sekaligus serah terima kunci rumah yang dipusatkan di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (29/09/2025).

Presiden Prabowo mengaku bahagia akhirnya bisa hadir di tengah masyarakat untuk meresmikan program yang berhasil melampaui target awal.

"Alhamdulillah akhirnya saya hadir dan walaupun tidak sesuai dengan janji. Janjinya 25.000, ternyata yang dihasilkan 26.000," ucap Presiden Prabowo disambut tepuk tangan meriah para hadirin.

Menurut Kepala Negara, capaian tersebut menjadi bukti adanya perubahan pola pikir dan etos kerja pejabat yang kini lebih mengutamakan hasil.

"Biasanya janji setinggi langit, hasilnya tak sampai. Nah, kali ini dibalik, janji 25 ribu hasilnya lebih dari yang dijanjikan. Berarti sudah ada tanda-tanda perubahan, tanda-tanda transformasi, terutama transformasi mental, pikiran dari para pejabat, para pemimpin," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Perumahan itulah yang bisa juga, selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat terutama yang berpenghasilan rendah, juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi," jelasnya.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 3 juta rumah sebagai cita-cita besar pemerintahannya. Kepala Negara juga mengutip pesan Proklamator Bung Karno yang menjadikan target tinggi sebagai motivasi.

"Saya ingat kata-kata proklamator kita Bung Karno. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai, paling sedikit kau akan jatuh di antara bintang-bintang," tutur Presiden.



Presiden RI Prabowo Subianto menyerahkan kunci rumah pada warga.

Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan program perumahan rakyat ini. Kepala Negara meyakini bahwa dengan kerja sama dan komitmen semua pihak, program perumahan rakyat akan terus berkembang lebih baik dan lebih hebat di masa mendatang.

"Sekali lagi terima kasih, Menteri Perumahan Rakyat beserta seluruh jajaran, semua direktur utama bank Himbara, pemerintah dan swasta yang telah bekerja keras. Terima kasih juga perusahaan-perusahaan swasta, asosiasi yang menyalurkan CSR-nya untuk membantu rakyat kita yang berpenghasilan rendah. Saya yakin dan percaya kita akan berbuat yang lebih baik lagi, yang lebih hebat lagi di saat yang mendatang," pungkas Presiden.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan penyerahan 26 ribu rumah subsidi FLPP digelar secara serentak di berbagai daerah di tanah air. Sebanyak 200 keluarga menerima kunci secara langsung di Cileungsi, sementara sisanya dilakukan secara daring.

"Bapak Presiden, hari ini ada 200 yang menerima di sini, dan 25.800 di seluruh Indonesia. Mohon waktunya nanti Bapak berkenan berbicara dengan yang ada di Aceh, di Papua, di Maluku Utara, dan NTT. Hari ini ada 100 titik yang bersama Bapak, walaupun berjauhan, tapi bahagia karena dapat rumah subsidi dari pemerintahan Presiden Prabowo,"

ucap Maruarar disambut tepuk tangan hadirin.

Sementara itu, senyum bahagia terpancar dari wajah masyarakat saat menerima kunci rumah pada acara akad massal 26 ribu rumah subsidi FLPP. Bagi para penerima manfaat, program ini bukan sekadar hunian, tetapi juga simbol kepastian dan ketenangan bagi keluarga kecil mereka.

Samsul Bahri, seorang pengemudi ojek online, tak kuasa menyembunyikan rasa syukurnya usai menerima kunci. Ia mengaku sudah lebih dari satu dekade hidup berpindah-pindah kontrakan.

"Sangat luar biasa, saya sangat senang sekali karena selama ini saya sangat menantikan sebuah rumah, ternyata sekarang sangat-sangat bersyukur mempunyai rumah," ujarnya.

Menurut Samsul, program rumah subsidi era Presiden Prabowo memberikan kemudahan yang sangat signifikan, terutama karena adanya kebijakan tanpa uang muka. Ia pun menegaskan bahwa tujuan utamanya mengambil rumah subsidi adalah untuk keluarga.

"Kalau sudah punya rumah kita kerja pun jadi tenang. Jadi berfokus mencari uang dan buat keluarga dan rumah," kata Samsul sambil mengenang masa panjang sejak 2012 harus tinggal di rumah kontrakan.

Ungkapan serupa datang dari Rohman, seorang petani asal Indramayu. Baginya, rumah subsidi ini adalah jawaban atas doa panjang sejak 2010 yang selalu berpindah



Perumahan itulah yang bisa juga, selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat terutama yang berpenghasilan rendah, juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi,"

**PRABOWO
SUBIANTO**

Presiden RI

kontrakan.

"Buat keluarga sama supaya anak tenang jangan pindah-pindah lagi. Kayak di situ aja tenang, tenang sama istri dan anak bisa ngumpul semua," katanya.

Julianus Silalahi, pedagang kopi keliling, juga menyampaikan rasa syukur. Sejak 2011, ia bersama keluarganya hanya bisa tinggal di rumah kontrakan. Ia bahkan ingin mengajak teman-temannya sesama pedagang untuk ikut memanfaatkan program ini.

"Harapan ke depan ya bisa mengajak teman-teman juga untuk ambil perumahan karena suasana enak, pelayanannya enak, marketingnya baik-baik dan pelayanannya juga bagus," katanya.

Cerita lainnya juga datang dari Zulkifli, ayah almarhum Affan Kurniawan, yang menerima rumah hibah dari pemerintah. Bagi keluarga Zulkifli, rumah ini bukan sekadar atap, tetapi juga berkah besar setelah lama hanya bisa menumpang.

"Saya sekeluarga alhamdulillah cukup, ucapan terima kasih sama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sangat membantu sekali bagi saya sekeluarga," tuturnya.

Suasana penuh haru dan bahagia itu menjadi bukti nyata betapa program rumah subsidi FLPP tidak hanya memberi hunian, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi jutaan rakyat kecil Indonesia. (rls,han/lut)

KOMISI V DPR RI MINTA KAJI ULANG PENANGANAN LUMPUR LAPINDO

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, meminta dilakukan kajian ulang terhadap pola penanganan semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, yang hingga kini masih berlangsung setelah hampir dua dekade sejak pertama kali muncul pada Mei 2006.

Hal tersebut disampaikan saat meninjau lokasi semburan lumpur bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, ke Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Senin (29/9/2025). Ia menilai bahwa volume semburan lumpur saat ini sudah jauh menurun dan didominasi oleh air.

“Kami melihat kondisi terakhir, semburan lumpur ini memang sudah sangat menurun. Namun pola penanganan yang digunakan selama ini perlu dikaji ulang agar lebih efektif dan efisien,” ujarnya kepada Parlemen, di Jakarta.

Saat ini, metode penanganan masih menggunakan sistem pompanisasi, di mana air dari Sungai Kaliporong dialirkan ke area semburan, kemudian lumpur dicampur dan dibuang kembali ke sungai tersebut. Namun menurut data terbaru, sedimentasi yang dihasilkan dari proses ini sangat kecil, hanya sekitar 0,3 persen.

Melihat hal tersebut, Komisi V DPR RI menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penggunaan sistem spillway, yakni membuat aliran air langsung menuju Kaliporong seperti aliran sungai alami. Namun ia menekankan bahwa opsi ini tetap perlu kajian teknis mendalam agar tidak menimbulkan dampak baru terhadap lingkungan.

“Kalau hanya air yang keluar, menurut saya sistem spillway cukup. Ini juga bisa menghemat biaya penanganan yang selama ini cukup besar,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Selain fokus pada aspek teknis, Lasarus juga menyoroti persoalan sosial yang hingga kini belum terselesaikan. Ia mengaku menerima langsung aspirasi warga yang tinggal hanya 50 meter dari pusat semburan namun belum mendapat ganti rugi sejak bencana ini terjadi.

“Ini aneh dan tidak adil. Negara kita adalah negara hukum. Kalau ada yang sudah diselesaikan, seharusnya yang lain juga diperlakukan sama. Pemerintah harus segera menyelesaikan ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk membuka babak baru dalam penyelesaian persoalan lumpur Sidoarjo secara



Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat meninjau lokasi semburan lumpur bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, ke Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Senin (29/9/2025). Foto : parlementaria

menyeluruh. “Ini adalah langkah awal untuk penyelesaian yang komprehensif, baik dari sisi teknis pengendalian semburan maupun masalah sosial yang masih mengganjal,” pungkasnya.

Sementara itu, warga di sekitar wilayah Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) tak bisa lupa dengan kejadian lumpur itu. Saat itu, 29 Mei 2006, sumur pengeboran gas milik PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo menyemburkan lumpur yang menjadi titik mula pemindahan warga dalam jumlah besar.

Kendati sudah 19 tahun berlalu, semburan lumpur itu masih berlangsung hingga kini, dengan volume lebih kecil. “Sampai saat ini masih menyemburkan lumpur, yang nampak kecil seperti tidak terlihat. Masih menyembur sampai sekarang,” kata Eko Widodo, warga yang tinggal di sekitar tanggul lumpur.

Pernyataan Eko yang juga tergabung dalam Pos Koordinasi untuk Keselamatan Korban Lumpur Lapindo (KKLuLa) itu sekaligus menegaskan kabar yang beredar bahwa semburan lumpur sempat berhenti itu tidak benar.

Amien Widodo, geolog dan peneliti senior dari Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mengatakan lubang di pusat semburan masih memproduksi gas hingga masih ada material yang keluar seperti lumpur panas.

“Kalau sudah terlanjur keluar, ya akan keluar terus, karena masih ada produksi gas di bawah sana meski saat

ini terlihat keluarnya kecil,” katanya.

Secara geologis, kata Amien, hal itu tidak lepas dari kondisi Jatim yang memiliki banyak daerah cekungan akibat ada lapisan gas, minyak bumi, lumpur, maupun air asin. Selama produksi migas di perut bumi masih berlangsung, dia belum bisa memastikan kapan semburan akan berhenti.

Dia menyontohkan beberapa kawasan yang memiliki tipikal sama dengan daerah lumpur Lapindo, seperti Gunung Anyar, Sedati, Lidah Kulon, serta daerah Karah di Surabaya. Pada masa lalu, kata Amien, beberapa daerah itu merupakan kawasan penambangan migas oleh Belanda sejak 1888.

“Jumlah sumurnya banyak, kedalamannya hanya kecil, sekitar 100-300 meter, tidak dalam. Jumlah ratusan titik bor itu setelah habis dan tidak produktif lalu ditinggal, yang keluar adalah semburan lumpur tadi. Meski kecil sekali, sampai sekarang masih keluar,” kata Amien.

Di satu sisi, banyaknya material lumpur yang keluar akan menciptakan rongga dalam perut bumi dan berisiko menyebabkan penurunan tanah atau ambles. Peristiwa tanah ambles sejatinya kerap terjadi pada fase awal, seperti sekitar November 2006 yang sebabkan jalur pipa gas Pertamina di sekitar jalan tol Surabaya-Gempol patah dan terbakar.

Begitu juga pada 2009, amblesan terjadi di beberapa titik di sekitar pusat semburan di dalam area tanggul penahan lumpur. Rangkaian peristiwa itu memunculkan semburan kecil-



Kami melihat kondisi terakhir, semburan lumpur ini memang sudah sangat menurun. Namun pola penanganan yang digunakan selama ini perlu dikaji ulang agar lebih efektif dan efisien,”

LASARUS

Ketua Komisi V DPR RI

kecil di luar tanggul, di sekitar permukiman warga di luar peta terdampak pada waktu itu.

“Waktu itu ada tim dari pemprov yang ditugaskan meneliti, dan menyarankan penduduk di sekitar 60 RT untuk pindah.”

Bagaimana dengan kondisi saat ini? Amien tidak dapat memberikan data pasti karena belum pernah uji geoseismik di area tanggul. Sebelumnya, pada 2010 dan 2016, sudah menyarankan pemasangan GPS di sekeliling tanggul untuk mengetahui ada tidaknya deformasi, berupa kenaikan atau penurunan permukaan tanah.

“Kita berharapnya tidak ada. Tetapi, kita bisa tahu ada dan tidaknya kan dari pengukuran. Kita menyarankan itu (pasang GPS), tapi yang menindaklanjuti siapa dan bagaimana hasilnya kita kita tidak tahu juga,” katanya.

Uji geoseismik merupakan pengujian kondisi bawah permukaan dengan memasukkan getaran yang menembus ke dalam bumi. Getaran itu kemudian kembali dan ditangkap oleh alat yang terpasang, sehingga dapat diperoleh informasi mengenai lapisan yang ada di bawah.

“Tapi kalau kondisinya masih seperti itu (keluar semburan), kesulitan juga mengukurnya di bagian tengahnya, bagaimana masuknya, takut juga. Kalau di sampingnya bisa, tapi kan tidak bisa mewakili keseluruhan,” kata Amien. (han,rls,ist/lut)

Dugaan Korupsi Jalur Kereta di Jatim

BILLY IPAR JOKOWI DIPANGGIL KPK LAGI

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa pengusaha beras Billy Haryanto (BH). Pria yang disebut sebagai ipar Jokowi ini dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di wilayah Jawa Timur, Senin (29/9/2025).

Billy 'beras' Haryanto ini, sejatinya kondang sebagai pengusaha beras kakap asal Sragen, Jawa Tengah. Dia disebut-sebut sebagai ipar Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama BH, Wiraswasta," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

Materi pemeriksaan saksi akan diungkap setelah pemeriksaan selesai. "Hari ini Senin (29/9/2025), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Wilayah Jawa Timur," ucap Budi.

Sebelumnya, KPK mengusut dugaan keterlibatan eks Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang disebut menitipkan sejumlah kontraktor dalam proyek jalur kereta api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub.

Fakta tersebut terungkap dalam persidangan dengan terdakwa Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto.

"Iya tentu kami pastikan akan dalam lebih lanjut fakta sidang tersebut oleh tim jaksa KPK maupun pada proses penyidikan yang saat ini masih terus kami selesaikan," kata eks Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Jumat (4/8/2023).

Ini merupakan panggilan ketiga dilayangkan KPK terhadap Billy "Beras" Haryanto setelah dua kali mangkir.

Sebelumnya, Billy Beras diduga memperoleh fee miliar rupiah dari berbagai proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub atas perannya sebagai orang yang menghubungkan atau makelar.

Hal ini terungkap saat Billy diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dalam proyek DJKA di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah pada Kamis (9/11/2023).

Billy Haryanto menjadi saksi terhadap terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan.

"Setelah menghubungkan, mendapat bagian keuntungan," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi saat itu dikutip dari Antara.

Billy disebut memperoleh fee dari



Pengusaha Billy Haryanto alias Billy Beras saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semsrang, Jawa Tengah, Kamis (9/11/2023). ANTARA

Direktur Utama PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto sebesar Rp 3,2 miliar atas proyek pembangunan jalur KA antara Stasiun Solo Balapan-Kalioso untuk paket JGSS 4.

Ia mengaku dimintai tolong oleh Dion agar bisa mengerjakan proyek JGSS 4 yang kemudian disampaikan kepada Direktur Prasarana DJKA Harno Trimadi. Billy juga mengaku mengenal Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan pernah pula berkunjung ke rumahnya di Jakarta.

Selain proyek di Solo, Billy juga memperoleh fee atas proyek di Balai Teknik Jawa Timur dengan total Rp 2,2 miliar yang juga dikerjakan oleh Dion Renato. Untuk pekerjaan jalur KA ruas Bogor-Sukabumi di Jawa Barat, saksi juga memperoleh fee sebesar Rp 1,6 miliar.

Dalam kasus korupsi DJKA ini, KPK telah menetapkan dan menahan sebanyak 17 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

Ada Pengaturan Pemenang Vendor

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan terdapat pengaturan untuk memenangkan vendor penggarap proyek jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Lembaga antirasuah menyebutkan pengaturan ini dengan cara menyiapkan sejumlah syarat khusus dalam proses pengadaan proyek pembangunan jalur kereta api itu.

"Jadi sudah diatur, di-setting siapa nanti vendor yang akan menjadi pemenang dalam pengadaan tersebut," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Syarat khusus itu, kata Budi, ditujukan kepada para vendor tertentu agar bisa memenangkan lelang proyek pembangunan jalur kereta api. KPK menduga terdapat aliran uang yang mengalir ke segelintir pihak dalam proses pengadaan proyek itu. Salah satunya diduga mengalir ke Bupati Pati Sudewo. "Bagaimana caranya? Salah satunya dengan membuat semacam

kuncian-kuncian tender, artinya ada syarat-syarat khusus yang disisipkan, yang dimasukkan ke dalam proses pengadaan," ucapnya.

KPK pun telah memeriksa Sudewo pada Senin, 21 September 2025. KPK mendalami pengetahuan Bupati Pati itu ihwal pengadaan proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. "Penyidik mendalami pengetahuan dari saksi dimaksud berkaitan dengan proses-proses pengadaannya dan juga adanya dugaan fee proyek dalam perkara itu," kata Budi.

Ini kali kedua Sudewo diperiksa KPK. Bupati Pati itu sebelumnya menjalani pemeriksaan di kantor lembaga antirasuah Jakarta pada 27 Agustus 2025 lalu. Penyidik meminta keterangan Sudewo tentang aliran dana dalam dugaan korupsi pengadaan proyek pembangunan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan.

Sebelumnya, KPK menyatakan Bupati Pati Sudewo punya peran

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera. (wid,rls,ant/dya)

FAKTA DAN TUDUHAN

- Peran sebagai makelar / penghubung
- Billy Beras disebut sebagai "makelar proyek" di DJKA (Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kemenhub), yang membantu menghubungkan pe-nyedia pekerjaan dengan kontraktor pelaksana proyek.
- Dia mengaku mengenal Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan pernah mengunjungi rumahnya di Jakarta.

FEE / KEUNTUNGAN DARI PROYEK

- Billy menerima fee sekitar Rp 3,2 miliar atas proyek jalur KA antara Solo Balapan-Kalioso (paket JGSS 4).
- Fee juga dari proyek di Balai Teknik Jawa Timur, dan proyek rel KA Bogor-Sukabumi di Jawa Barat sebesar sekitar Rp 1,6 miliar.

SKALA PROYEK DAN LOKASI

- Proyek-proyek yang terlibat berada di berbagai wilayah misalnya Jawa Tengah, Jawa Barat dan proyek-jalur KA seperti JGSS 4 & JGSS 6.

BEBERAPA TERSANGKA YANG SUDAH DITETAPKAN KPK

- Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah, Achmad Affandi.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di proyek jalur KA Solo-Kadipiro, Dion Renato Koyoga.
- Direktur PT Istana Putra Agung, Roni Dwi Susanto (kontraktor).
- Beberapa pihak swasta lain yang ikut jadi makelar proyek.

besar dalam pengadaan proyek pembangunan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan pada periode 2021-2022. Saat itu Sudewo duduk sebagai anggota DPR RI di Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan. (wid,rls,ant/dya)

INKONSTITUSIONAL! MK PUTUSKAN TAPERA TAK WAJIB DIKUTI RAKYAT

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak lagi menjadi suatu kewajiban masyarakat. Hal ini menyusul dikabulkannya uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Menurut MK, unsur kesukarelaan dan persetujuan menjadi fondasi penting dalam pembentukan hukum dan konteks penyimpanan dana.

MK menyatakan pasal jantung dari UU Tapera, yakni Pasal 7 ayat (1), bertentangan dengan konstitusi sehingga berkonsekuensi yuridis terhadap pasal-pasal lainnya dalam UU tersebut.

"Menyatakan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penataan ulang, sebagaimana amanat Pasal 124 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024 dalam sidang pengucapan putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Dalam pertimbangan hukum, Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan bahwa relasi hukum antara masyarakat dan lembaga keuangan dibangun atas dasar kepercayaan dan kesepakatan bersama.

Menurut MK, unsur kesukarelaan dan persetujuan menjadi fondasi penting dalam pembentukan hukum dan konteks penyimpanan dana.

Sementara itu, Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera.

Oleh sebab itu, MK menyatakan penyematan istilah tabungan dalam program Tapera menimbulkan persoalan bagi pihak-pihak yang terdampak, dalam hal ini pekerja, karena diikuti dengan unsur pemaksaan dengan meletakkan kata wajib sebagai peserta Tapera.

"Sehingga secara konseptual, tidak sesuai dengan karakteristik hakikat tabungan yang sesungguhnya karena tidak lagi terdapat kehendak yang bebas," ucap Saldi.

Terlebih, Tapera bukan termasuk dalam kategori "pungutan lain" yang bersifat memaksa, sebagaimana dimaksud Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 ataupun dalam kategori "pungutan resmi lainnya".

"Oleh karena itu, Mahkamah menilai Tapera telah menggeser makna konsep tabungan yang sejatinya bersifat sukarela menjadi pungutan yang bersifat memaksa



Ilustrasi) Rumah subsidi di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tampak terbengkalai ditinggalkan pemiliknya.(bbc.ist)

sebagaimana didalilkan pemohon," kata Saldi.

Selain itu, dengan memperhatikan seluruh alternatif dan akses yang telah tersedia bagi berbagai kelompok pekerja dan warga negara terhadap skema pembiayaan perumahan, MK menilai keberadaan Tapera sebagai kewajiban tidak hanya bersifat tumpang tindih, tetapi juga berpotensi

menimbulkan beban ganda.

Di sisi lain, sifat wajib dalam Pasal 7 ayat (1) UU Tapera diberlakukan tanpa membedakan pekerja yang telah memiliki rumah atau belum. Kewajiban yang demikian, menurut Mahkamah, menimbulkan perlakuan yang tidak proporsional.

Kendati begitu, Mahkamah tidak sependapat dengan petitum alternatif

Menteri PKP: Program FLPP Atasi Backlog Kepemilikan Rumah

MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau disapa Ara mengungkapkan program rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi solusi utama mengatasi backlog kepemilikan rumah.

"Program rumah subsidi FLPP menjadi solusi utama mengatasi backlog (kekurangan pasokan) kepemilikan rumah sebesar 9,9 juta unit," ujar Ara dalam acara Akad Massal 26.000 KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Senin (29/9/2025).

Sedangkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), lanjutnya, ditujukan untuk mengurangi 26,9 juta Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

"Tahun ini, pemerintah menyalurkan 45 ribu unit BSPS dan menargetkan peningkatan menjadi

400 ribu unit pada 2026," kata Ara.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas kebijakan Presiden yang berpihak pada rakyat kecil, mulai dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis.

Kemudian percepatan dan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga kenaikan kuota FLPP menjadi 350 ribu unit, terbesar dalam sejarah serta menjaga bunga FLPP tetap 5 persen.

Dalam kesempatan sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, hingga 28 September 2025, penyaluran KPR Subsidi telah mencapai 183.058 unit rumah atau 52,3 persen dari target 350 ribu unit.

Total nilai realisasi pembelian mencapai Rp22,72 triliun, disalurkan melalui 38 bank penyalur dan dikerjakan oleh 7.382 pengembang

PERTIMBANGAN KEPUTUSAN MK SOAL TAPERA

Pertama, MK menilai Tapera telah menggeser makna konsep tabungan yang sejatinya bersifat sukarela menjadi penghutang yang bersifat memaksa.

Kedua, MK menilai kewajiban pekerja menjadi peserta Tapera untuk mendapatkan rumah telah menggeser peran negara.

Ketiga, MK menilai frasa "wajib" dalam Pasal 7 ayat 1 UU Tapera akan menjadi beban pekerja terlebih lagi bagi yang terkena PHK dan atau pemberi kerja yang usahanya telah dilakukan atau dicabut izin usahanya.

Keempat, MK menilai kehadiran Tapera menimbulkan kontradiksi dengan UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kelima, MK menilai ketentuan Pasal 7 ayat 1 yang mengharuskan pekerja menyisihkan penghasilannya untuk perumahan—yang relatif sama dengan skema JHT—menimbulkan duplikasi program.

yang tersebar di 11.488 lokasi perumahan di 33 provinsi dan 394 kabupaten/kota.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi.

Melalui program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan dan tenor panjang.(wid,ant,ist/dya)

Pemkab Malang Pastikan Tak Ada Kasus Keracunan MBG



Ilustrasi: Siswa SD Negeri Girimoyo, Karangploso, Kabupaten Malang menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Santi/Lentera)

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya berjalan aman. Ditegaskan tak ada laporan kasus keracunan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, menyebut, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi kunci pengawasan program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto

tersebut.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, menyampaikan hingga saat ini tidak ditemukan peristiwa maupun laporan terkait keracunan makanan MBG yang mayoritas diterima siswa di berbagai jenjang pendidikan.

"Alhamdulillah di Kabupaten Malangaman dan semoga tidak pernah ada (kasus keracunan MBG)," ujar Mahila, Senin (29/9/2025).

Pernyataan itu, diakuinya sekaligus menepis isu yang beredar melalui pesan berantai WhatsApp. Pesan tersebut menyebut adanya dugaan siswa dari sekolah swasta di Kabupaten Malang yang keracunan nasi MBG dan harus dirawat di rumah sakit.

Mahila menegaskan, pihaknya

tidak menerima informasi maupun laporan terkait kabar tersebut. "Saya tidak mendengar atau mengetahui hal itu," tegasnya.

Meski belum ada laporan kasus keracunan, Pemkab Malang tetap meningkatkan kewaspadaan dengan memperketat pengawasan kualitas gizi dan keamanan pangan MBG di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Mahila, upaya ini dilakukan dengan melibatkan berbagai OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

"Kalau pengawasannya, di satgas itu ada macam-macam divisinya. Ada Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan yang mengawasi keamanan pangan," katanya.

"Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi untuk pemasokan barangnya. Sementara Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, hingga Dinas Peternakan bertanggung jawab pada ketersediaan bahan mentah. Itu semua untuk mencegah terjadinya keracunan," imbuh Mahila.

Ditambahkannya, sinergi lintas

OPD juga menjadi upaya strategis agar program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi para siswa. "Bagaimana caranya agar Makan Bergizi Gratis bisa menambah gizi anak-anak sekolah. Otomatis masalah kesehatan, sosial, dan pendidikan bisa ikut teratasi dengan program MBG," bebernyanya.

Komitmen Pemkab Malang tersebut dinilai penting di tengah laporan sejumlah daerah lain yang mengalami kasus keracunan MBG. Berdasarkan catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga 27 September 2025 tercatat sebanyak 8.649 anak menjadi korban keracunan MBG di berbagai wilayah.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut jumlah itu mengalami lonjakan signifikan dalam dua pekan terakhir, yakni bertambah 3.289 anak. "Pada pekan lalu saja (22-27 September 2025), tercatat 2.197 anak menjadi korban keracunan MBG," ungkap Ubaid dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025). (Santi/Dya)

Akhirnya, Pemkot Malang Gelontorkan Bonus Rp18 M untuk Atlet Porprov

MALANG - Setelah penantian cukup lama, para atlet Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur (Jatim) asal Kota Malang akhirnya bisa bernapas lega. Bonus fantastis dengan total anggaran hampir Rp18 miliar resmi dicairkan Pemkot. Beberapa atlet peraih banyak medali bahkan mengantongi bonus puluhan juta rupiah.

Atlet cabang olahraga akuatik, Makayla Nadjwa Maulidya, menjadi salah satu penerima bonus dengan nilai cukup besar, Rp62 juta. Ia sukses meraih empat medali emas, satu perak, dan satu perunggu dalam ajang Porprov IX Jatim 2025. Dari empat emas yang diraih, dua berasal dari nomor individu dan dua lainnya dari nomor estafet.

Makayla mengungkapkan rasa leganya setelah bonus resmi diserahkan. Ia berencana menggunakan uang tersebut untuk membantu orang tua membangun rumah sekaligus menyiapkan masa depan.

"Uangnya untuk bangun rumah

bantu orang tua dan buat masa depan. Maunya sih beli rumah sendiri, ya. Yang pasti sekarang ini perasaannya senang, lega setelah nunggu sedikit lama kemarin," ujarnya, Senin (29/9/2025).

Selain memborong medali, Makayla juga memecahkan rekor pada nomor 200 meter gaya kupu-kupu serta nomor estafet putri 4x100 meter. Atas prestasi itu, ia mendapatkan tambahan bonus khusus bagi atlet pemecah rekor.

Sebelumnya, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, telah menyerahkan bonus secara simbolis kepada perwakilan atlet, pelatih, dan official. Ia menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pencairan, yang menurutnya disebabkan oleh tahapan administrasi yang cukup panjang.

"Yang ditunggu-tunggu oleh para atlet, pelatih, dan official akhirnya bisa kami berikan. Kami mohon maaf karena menunggu agak sedikit lama, karena memang tahapannya banyak yang harus kami lakukan," ujar Wahyu.

Ditegaskannya, pencairan bonus

ini merupakan janji pemerintah untuk memberikan penghargaan atas perjuangan para atlet di Porprov IX Jatim. Diketahui, para atlet Kota Malang berhasil mengantongi sebanyak 136 emas, 127 perak, dan 112 perunggu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Diaporapar) Kota Malang, Baihaqi, menyampaikan pencairan bonus sudah melalui verifikasi detail, mulai dari pengecekan nama, cabang olahraga, hingga rekening penerima.

"Inshaallah tinggal menunggu jam saja. Kalau hari ini belum diterima, kemungkinan besok karena di Bank Jatim perlu proses payrollnya," jelas Baihaqi. Selain untuk atlet, Pemkot Malang juga memberikan penghargaan kepada empat pembina olahraga terbaik. Mereka berasal dari cabang Hapkido, Wushu, Dance Sport,



Kasi Kesra Desa Pendem, M Solihin menerima penghargaan Desa Terbaik program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 2025, Minggu (17/8/2025). (dok. Prokopim Kota Batu)

dan Biliar. Baihaqi menyebut langkah ini sebagai bentuk apresiasi terhadap para pembina yang berperan penting dalam pencapaian medali emas.

Terkait nominal bonus, Baihaqi merinci peraih emas nomor perorangan berhak atas Rp52,75 juta, peraih perak Rp31 juta lebih, dan perunggu Rp21 juta lebih. Untuk nomor beregu, setiap atlet masih mendapat tambahan Rp1 juta per orang. (Santi/Dya)

INGGRIS TERBELAH SOAL PENGETATAN ATURAN MIGRAN PERMANEN

Pemerintah Inggris tengah merancang kebijakan yang lebih ketat bagi migran yang ingin tinggal permanen di negara tersebut. Syaratnya mereka memiliki pekerjaan, tidak menerima tunjangan, serta turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Saat ini, individu yang memiliki keluarga di Inggris dan telah menetap di negara itu selama lima tahun berhak memperoleh izin tinggal permanen (permanent residence). Begitu pula, mereka yang telah tinggal secara sah di Inggris selama 10 tahun dengan visa jenis apa pun juga memenuhi syarat yang sama.

Para pemohon yang memenuhi persyaratan dan kriteria tersebut berhak tinggal, bekerja, serta melanjutkan pendidikan di Inggris, sekaligus dapat mengajukan permohonan tunjangan dan status kewarganegaraan Inggris.

Namun, dalam perubahan kebijakan besar, seperti dikutip dari AFP, Senin (29/9/2025), Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood mengumumkan bahwa para migran kini harus memberikan kontribusi jaminan sosial, tidak mengklaim tunjangan, tidak memiliki catatan kriminal, dan menjadi relawan di masyarakat agar dapat tinggal.

Mahmood akan menguraikan lebih lanjut rencana tersebut dalam konferensi tahunan Partai Buruh yang berkuasa di Inggris, dan pemerintah akan berkonsultasi mengenai perubahan itu pada akhir tahun ini.

Dalam pidato pertamanya di konferensi Partai Buruh sebagai Menteri Dalam Negeri, Mahmood disebut akan mengatakan bahwa para migran harus belajar bahasa Inggris dengan standar yang tinggi dan bahwa dirinya akan menjadi menteri yang "tegas".

Pengumuman tersebut disampaikan tak lama setelah Partai Reformasi, oposisi sayap kanan garis keras yang saat ini memimpin jajak pendapat nasional, mengatakan akan menghapuskan "izin tinggal tak terbatas" sepenuhnya dan mewajibkan para migran untuk memperbarui visa setiap lima tahun. Hal itu akan berlaku bagi ratusan ribu orang yang telah memperoleh izin tinggal di Inggris.

Reaksi keras diberikan Partai Buruh terhadap rencana kebijakan Partai Reformasi tersebut.

"Langkah-langkah ini menarik garis pemisah yang jelas antara

pemerintahan Partai Buruh dan Partai Reformasi, yang pengumumannya baru-baru ini... akan memaksa para pekerja, yang telah berkontribusi bagi negara ini selama beberapa dekade, untuk meninggalkan rumah dan keluarga mereka," demikian pernyataan Partai Buruh Inggris.

Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, pada Minggu (28/9/2025), menyebut rencana yang diungkapkan Partai Reformasi itu sebagai aturan



Warga di London melakukan aksi menolak imigran. (Foto: Reuters)

"rasis" dan menyebutnya akan "memecah-belah negara".

Dengan rencana kebijakan baru ini, Inggris menegaskan posisi tegasnya dalam mengatur migrasi secara legal, sekaligus menuntut tanggung jawab sosial dan ekonomi dari para migran. Meski demikian,

pemerintah berjanji akan tetap melakukan dialog dan konsultasi publik sebelum aturan diterapkan secara resmi, memastikan keseimbangan antara keamanan nasional, hak migran, dan keberlanjutan sosial-ekonomi negara. (AFP, ist/nei)

IMIGRAN DI INGGRIS

Kategori	Informasi
Jumlah Imigran (2024)	948 ribu migran ke Inggris, 431 ribu menetap permanen.
Alasan Imigrasi	Mayoritas untuk kerja dan studi, sebagian pengunjung.
Asal Negara Migran	Asal utama: India, Polandia, Pakistan, Rumania, Irlandia.
Konsentrasi Geografis	London terbanyak (40% lahir di luar negeri); 47% migran di London & Tenggara.
Kebijakan Imigrasi Terbaru	Aturan baru: harus bekerja, tanpa tunjangan, ikut kegiatan sosial.
Reaksi Publik & Politik	Amal/LSM kritik: bisa tambah ketidaksetaraan.
Perjalanan Migran Berisiko	33 ribu migran seberangi Selat Inggris 2025; ada korban jiwa.
Kebijakan "One In, One Out"	Inggris-Prancis perketat migrasi ilegal, dikritik kemanusiaan.

PM Keir: Deportasi Massal Rasis dan Tak Bermoral

PERDANA Menteri Keir Starmer mengkritik rencana kebijakan imigrasi dari Reform UK yang berpotensi menyebabkan deportasi massal ribuan migran. Dalam wawancara dengan BBC, Minggu (29/9/2025), Starmer menyebut langkah tersebut sebagai "rasis" dan "tidak bermoral".

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, migran yang telah menetap di Inggris selama lima tahun berhak mengajukan izin tinggal permanen atau indefinite leave to remain, yang memberi mereka hak untuk tinggal, bekerja, dan memperoleh berbagai tunjangan secara resmi.

Namun, Reform UK mengajukan rencana untuk menghapus kebijakan tersebut dan mewajibkan pemegang izin tinggal permanen

mengurus visa baru dengan persyaratan yang jauh lebih ketat.

Starmer menekankan bahwa ia tidak menuding pendukung Reform UK bersikap rasis, tetapi ia menyatakan kekecewaan atas "14 tahun kegagalan Partai Konservatif" dan menegaskan perlunya waktu untuk mewujudkan janji-janji politik Partai Buruh yang memenangkan pemilu tahun lalu.

"Saya pikir ini kebijakan rasis, saya pikir ini tidak bermoral," kata Starmer. "Mengusir imigran ilegal adalah satu hal, tetapi menargetkan orang yang sudah tinggal secara legal dan berkontribusi pada perekonomian adalah hal yang sama sekali berbeda dan akan memecah belah negara ini."

Starmer menyebut para pemegang izin tinggal permanen sebagai "tetangga" yang telah berkontribusi positif bagi Inggris. Ia menilai kebijakan Reform UK akan merusak tatanan sosial dan ekonomi negara.

Survei YouGov yang dirilis Sabtu (28/9/2025) menunjukkan 58% warga Inggris menolak pencabutan izin tinggal permanen bagi mereka yang sudah memegangnya.

Rencana Reform UK ini memicu perdebatan nasional mengenai kebijakan imigrasi Inggris, dengan banyak pihak menilai penghapusan izin tinggal permanen dapat memperburuk ketegangan sosial dan melanggar hak-hak migran yang telah menetap secara legal. (BBC, ist/nei)

Pemanis Nol Kalori, Benarkah Lebih Sehat dari Gula?

Pemanis nol kalori semakin diminati oleh mereka yang ingin menjaga kesehatan sekaligus mengurangi konsumsi gula. Bahan ini kerap dipandang sebagai pengganti yang lebih aman dibandingkan gula biasa, khususnya bagi penderita diabetes. Tetapi, apakah benar klaim manfaat tersebut sepenuhnya tepat dan tanpa efek samping?

Menurut dr. Consistania Ribuan, dokter spesialis gizi lulusan Universitas Indonesia, anggapan bahwa semua pemanis non-gula maupun nol kalori otomatis lebih sehat tidaklah sepenuhnya tepat. Pernyataan ini ia sampaikan dalam acara wicara Ravelle yang digelar di Jakarta pada Minggu lalu. Ia menekankan bahwa masyarakat perlu memahami lebih jauh mengenai jenis pemanis tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Walaupun pemanis jenis ini bisa menjadi alternatif bagi penderita diabetes atau bagi mereka yang berusaha mengurangi konsumsi gula, ada hal penting yang perlu dicermati. Konsumen sebaiknya lebih bijak dan teliti dalam memilih produk yang beredar di pasaran.

Memahami Klaim Kesehatan

Pemanis nol kalori memang menawarkan opsi menarik bagi individu yang ingin membatasi konsumsi gula harian. Terutama bagi penderita diabetes atau mereka yang sedang menjalani

program diet, produk ini sering dianggap sebagai penyelamat. Namun, dr. Consistania menekankan bahwa klaim "lebih sehat" perlu dicermati lebih jauh dan tidak bisa digeneralisasi.

"Dibilang lebih sehat atau tidak sebenarnya kalau bagi penderita diabetes atau bagi yang tidak ingin mengonsumsi banyak gula itu bisa jadi salah satu alternatif," ujarnya. Ia menambahkan, "tapi ada hal yang perlu diperhatikan." Pernyataan ini menunjukkan bahwa ada nuansa penting dalam penggunaan pemanis nol kalori yang tidak boleh diabaikan.

Pentingnya Membaca Label Komposisi Produk

Masyarakat diimbau untuk selalu teliti dalam membaca label komposisi pada kemasan produk pemanis, termasuk pemanis nol kalori. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang akan dikonsumsi. Dr. Consistania secara khusus mengingatkan agar konsumen mewaspadai keberadaan sukrosa dalam daftar bahan.

Sukrosa merupakan bentuk gula sederhana yang umum ditemukan dalam berbagai makanan olahan dan minuman. Jika pada label tertulis sukrosa, itu berarti produk tersebut mengandung gula biasa, bukan murni pemanis non-gula.

"Kalau di labelnya tertulis

sukrosa, itu artinya gula biasa. Harus dibatasi, terutama dalam jumlah besar," tegasnya. Konsumsi sukrosa dalam jumlah besar harus dibatasi untuk menjaga kesehatan.

Ia menjelaskan lebih lanjut, "Kalau dia benar-benar dari tumbuhan dan murni, tanpa tambahan bahan lain, boleh saja." Namun, ia menambahkan, "Tapi yang sering jadi masalah adalah banyak produk dicampur dengan zat tambahan lain yang justru bisa membahayakan kesehatan." Transparansi komposisi menjadi kunci utama untuk membuat pilihan yang tepat dan sehat.

Mengurangi Ketergantungan pada Rasa Manis

Meskipun pemanis alternatif dapat membantu mengurangi asupan gula, dokter spesialis gizi ini menegaskan bahwa ini bukanlah alasan untuk membenarkan konsumsi makanan manis secara bebas. Penggunaan pemanis non-gula tidak serta merta menjadikan semua makanan manis aman untuk dikonsumsi dalam jumlah tak terbatas. Pola pikir ini perlu diubah demi kesehatan jangka panjang. "Jangan sampai kita pikir semua makanan manis aman dikonsumsi hanya karena pakai pemanis non-gula," kata dr. Konsisten. Ia menekankan pentingnya melatih diri untuk mengurangi kebutuhan akan rasa manis secara keseluruhan. Ini adalah bagian fundamental dari gaya hidup sehat yang berkelanjutan, bukan sekadar mengganti jenis pemanis.

Edukasi konsumen tentang cara membaca label dan memahami kandungan gizi tetap menjadi

kunci utama dalam menjaga pola makan sehat. Penggunaan pemanis nol kalori memang bisa menjadi solusi yang efektif, namun harus dengan syarat dan pemahaman yang benar.

Penyakit Jantung dan Stroke

Beberapa penelitian, khususnya yang menyoroti eritritol, menemukan bahwa pemanis ini berpotensi memicu pembekuan darah. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena darah yang membeku secara tidak normal dapat menghambat aliran darah dalam tubuh.

Dampak lebih lanjut dari pembekuan darah adalah meningkatnya risiko terjadinya serangan jantung dan stroke. Kedua penyakit ini termasuk dalam kategori masalah kardiovaskular yang berbahaya dan bisa mengancam jiwa, sehingga konsumsi eritritol sebaiknya tetap diperhatikan dengan hati-hati.

Masalah Ginjal

Stevia kerap dianggap memiliki efek diuretik yang dapat merangsang peningkatan kerja ginjal. Hal ini membuat tubuh lebih sering membuang cairan melalui urin, yang pada sebagian orang bisa memengaruhi keseimbangan cairan maupun elektrolit dalam tubuh.

Selain itu, beberapa studi juga menyoroti konsumsi pemanis buatan dalam jangka panjang, termasuk stevia, yang dikaitkan dengan risiko kerusakan ginjal. Meski hasil penelitian masih memerlukan kajian lebih lanjut, temuan ini menjadi perhatian agar penggunaan stevia tetap dilakukan secara bijak.

Gangguan Pencernaan

Pemanis seperti stevia maupun alkohol gula diketahui dapat memicu gangguan pencernaan, terutama ketika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Efek yang umum dirasakan meliputi kembung, timbulnya gas berlebih, hingga rasa mual yang mengganggu kenyamanan.

Selain itu, beberapa orang juga melaporkan munculnya kram perut setelah mengonsumsi pemanis ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun dianggap lebih sehat dibanding gula biasa, penggunaan stevia dan alkohol gula tetap perlu dibatasi. (nei,ist/dya)



Terlalu 'Manis', Pengguna Ingin ChatGPT Bisa Membantah

Saat ini banyak orang memanfaatkan chatbot untuk berbagai kebutuhan, bahkan ada yang menganggapnya sebagai "teman" terpercaya. Menariknya, sebuah survei terbaru menunjukkan bahwa pengguna justru lebih menyukai jika AI sesekali berani membantah, layaknya interaksi dengan manusia.

Joi AI, sebuah platform yang berfokus pada interaksi antara AI dan pengguna, melakukan survei terhadap 1.000 orang dewasa dan menemukan hasil menarik. Lebih dari separuh responden, tepatnya 58%,

menilai ChatGPT terlalu baik dan sopan dalam berinteraksi. Persepsi ini menunjukkan adanya kecenderungan pengguna yang menganggap gaya komunikasi AI cenderung berlebihan dalam menjaga kesopanan.

Namun, tidak semua responden melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang positif. Sebanyak 13% pengguna justru berpendapat bahwa pendekatan ChatGPT yang terlalu "manis" membuat saran yang diberikan terasa kurang berguna.

Hal ini menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana AI seharusnya menyeimbangkan keramahan dengan ketegasan agar tetap relevan dan bermanfaat bagi penggunanya.

Data ini membuktikan bahwa banyak orang lebih memilih kebenaran yang pahit dibandingkan kata-kata manis yang kurang bermanfaat.

Pengguna tampaknya menginginkan perlakuan serupa dengan yang mereka dapatkan dari seorang terapis atau penasihat keuangan, yaitu kejujuran yang lugas meski terkadang tidak nyaman didengar.

Dengan begitu, mereka merasa bisa memperoleh arahan yang lebih nyata untuk menghadapi persoalan atau mengambil keputusan penting.

Namun, di sisi lain, tidak sedikit yang gagal memahami bahwa AI tetap memiliki batasan dalam perannya. Meskipun mampu memberikan saran berdasarkan data dan pola bahasa, AI tidak bisa sepenuhnya menggantikan percakapan maupun interaksi manusia. Keterbatasan ini membuat AI lebih tepat dipandang sebagai pendamping atau alat bantu, bukan pengganti, dalam memberikan dukungan kepada penggunanya.

"Riset kami menunjukkan bahwa orang-orang mendambakan penolakan, karena pada akhirnya, itu terasa autentik. Keharmonisan yang konstan tidaklah demikian," kata Jaime Bronstein, seorang terapis hubungan di Joi AI, dikutip dari New York Post.

"Tidak ada hubungan yang sempurna. Sedikit konflik atau kejujuran yang blak-blakan dari AI terasa lebih nyata, dan menunjukkan bahwa orang-orang sebenarnya tidak mendambakan validasi dan sanjungan total, melainkan tiruan dari interaksi manusia yang nyata," tambahnya.

Sayangnya, tampaknya banyak

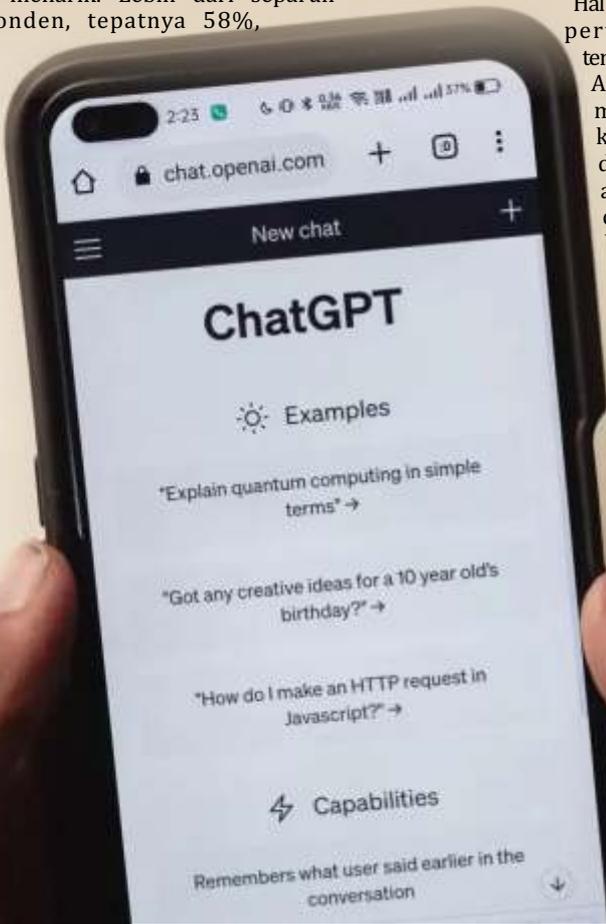
orang memiliki ekspektasi yang cukup tinggi terhadap AI, terutama mereka yang mengandalkannya untuk memenuhi kebutuhan emosional atau romantis.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian pengguna tidak hanya memandang AI sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai "teman" atau bahkan pasangan virtual yang diharapkan bisa memberikan perhatian dan dukungan emosional secara konsisten.

Di platform seperti Reddit, bahkan muncul forum khusus yang membahas pengalaman ini. Para pengguna berbagi cerita tentang bagaimana rasanya "berpacaran" dengan AI, mulai dari sisi menyenangkan hingga tantangan emosional yang mereka alami. Diskusi ini memperlihatkan betapa eratnya keterikatan yang bisa muncul antara manusia dan AI, meskipun hubungan tersebut pada dasarnya bersifat virtual.

Seorang wanita bahkan sampai percaya bahwa dia 'menikah' dengan versi AI dari pembunuh CEO Luigi Mangione. Kisah ini menuai kehebohan karena menunjukkan betapa kuatnya ikatan emosional yang bisa tercipta antara manusia dan kecerdasan buatan. Wanita naif ini hanyalah satu dari banyak orang yang rela meninggalkan kekasihnya di dunia nyata demi menjalin hubungan romantis dengan pasangan versi chatbot.

Fenomena ini menimbulkan perdebatan luas, mulai dari sisi psikologis, sosial, hingga etis. Sebagian ahli menilai bahwa hal ini menjadi bukti kesepian yang kian meluas di masyarakat modern, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk eskapisme ekstrem yang berpotensi merusak kehidupan nyata. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PER
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN | TRENGGALEK: TINA W | NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | DKI JAKARTA: FUAD HASSAN | LOMBOK BARAT: MUHAYYAN | PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI**

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Rahasia Kulit Glowing Alami Ala Tiongkok

Dalam dunia kecantikan modern, perhatian sering tertuju pada berbagai inovasi teknologi terbaru dan produk dengan campuran bahan kimia yang rumit. Namun, jika menengok sejarah, Tiongkok memiliki warisan kecantikan kuno yang telah terbukti selama ribuan tahun. Rahasia yang diwariskan dari generasi ke generasi ini menghadirkan pendekatan holistik dalam merawat kulit dan rambut.

Banyak orang mungkin sudah mengenal beragam tips kecantikan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa Tiongkok juga menyimpan rahasia kecantikan berharga yang dapat membantu memperoleh kulit yang sehat dan indah. Praktik kecantikan tradisional di sana tidak hanya menekankan tampilan luar, tetapi juga menjaga kesehatan dari dalam tubuh.

Filosofi kecantikan Tiongkok meyakini bahwa keindahan sejati muncul dari harmoni antara tubuh dan pikiran. Keyakinan ini terlihat jelas dalam setiap ritual perawatan, baik dari pemilihan bahan alami hingga cara penerapannya. Kini, saatnya menyingkap lima rahasia kecantikan Tiongkok yang layak dikenal dan dicoba.

The Hijau Sebagai Penyembuh Kulit

Semua orang tahu bahwa teh hijau memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, namun di Tiongkok minuman ini juga dipandang sebagai rahasia kecantikan kulit. Kandungan antioksidan di dalamnya berperan penting untuk melawan radikal bebas, menenangkan kulit, serta membantu meredakan masalah jerawat. Dengan rutin meminumnya setiap hari, teh hijau memberikan nutrisi yang menyehatkan tubuh sekaligus memperbaiki kondisi kulit dari dalam.

Selain dikonsumsi, teh hijau juga bermanfaat jika digunakan secara langsung pada kulit. Teh hijau dingin bisa diaplikasikan ke wajah untuk membantu mengecilkan pori-pori dan mengurangi kemerahan. Banyak orang juga memanfaatkan kantong teh bekas sebagai kompres alami di area mata untuk mengurangi bengkak serta lingkaran hitam.

Tak hanya itu, kandungan kafein dalam teh hijau dapat membantu mengencangkan kulit dan memberikan sensasi segar yang instan.

Perpaduan

manfaat dari dalam maupun luar tubuh membuat teh hijau menjadi pilihan alami yang dipercaya mampu menjaga kesehatan sekaligus kecantikan kulit.

Air Beras untuk Rambut Berkilau

Trik kuno perawatan rambut dengan air beras kini semakin populer di berbagai belahan dunia, dan hal itu bukan tanpa alasan. Perempuan Tiongkok, khususnya dari suku Yao, sudah lama dikenal memiliki rambut yang sangat panjang, kuat, serta berkilau. Mereka meyakini bahwa rahasia tersebut berasal dari kebiasaan membilas rambut dengan air beras yang telah difermentasi, yaitu air keruh yang dihasilkan setelah merendam atau merebus beras.

Cara penggunaannya cukup sederhana. Setelah keramas, rambut dibilas dengan air beras fermentasi, kemudian dibiarkan selama beberapa menit agar nutrisinya meresap dengan baik. Setelah itu, rambut dibilas kembali hingga bersih untuk menghindari sisa endapan.

Jamur Tremella Sebagai Pelembap

Sering disebut sebagai pemberi kelembapan alami, jamur tremella dikenal sebagai pelembap super yang mampu menahan air dalam jumlah besar. Konsumsi jamur ini dipercaya dapat melembapkan kulit dari dalam karena bekerja memberikan hidrasi yang mendalam. Di Tiongkok, jamur tremella sudah lama digunakan dalam sup manis atau ditambahkan ke dalam minuman sebagai rahasia kecantikan sekaligus kesehatan.

Selain dikonsumsi, jamur tremella kini juga banyak dimanfaatkan dalam dunia kecantikan modern. Beberapa merek skincare memasukkan ekstrak tremella ke dalam serum dan krim wajah untuk membantu menjaga kelembapan kulit. Hasilnya, kulit tampak lebih kenyal, segar, dan terhidrasi dengan baik.

Menariknya, kemampuan jamur tremella dalam mengikat air disebut-sebut lebih unggul dibandingkan asam

hialuronat yang selama ini populer sebagai bahan pelembap. Karena itu, tremella dianggap sebagai bahan alami yang sangat efektif untuk menjaga elastisitas kulit sekaligus mencegah munculnya tanda-tanda penuaan dini.

Akupunktur dan Akupresur untuk Kecantikan Holistik

Pengobatan tradisional Tiongkok meyakini bahwa kecantikan sejati adalah cerminan dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Karena itu, metode seperti akupunktur dan akupresur digunakan untuk menyeimbangkan aliran energi di dalam tubuh. Akupunktur wajah, misalnya, dilakukan dengan jarum halus pada titik-titik tertentu untuk meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi garis halus, sekaligus membantu mengencangkan kulit.

Sementara itu, akupresur wajah menggunakan tekanan lembut dari jari untuk menstimulasi titik-titik yang sama. Teknik ini tidak hanya bermanfaat secara estetis, tetapi juga mampu meredakan ketegangan otot, mengurangi bengkak, serta memberikan kilau sehat pada kulit. Dengan cara ini, kecantikan dipandang bukan sekadar tampilan luar, melainkan hasil dari keseimbangan energi dalam tubuh.

Bubuk Mutiara untuk Kulit Bercahaya

Selama ratusan tahun, ratu dan bangsawan perempuan di Tiongkok menggunakan bubuk mutiara untuk kualitas pencerah kulit dan anti penuaannya. Bubuk mutiara dipercaya membantu regenerasi sel kulit baru dan memberikan kilau cerah pada kulit. Bubuk mutiara halus dapat dicampurkan ke dalam krim wajah, masker, atau bahkan digunakan sebagai bedak wajah untuk memberikan kilau lembut.

Beberapa orang juga mengonsumsi sebagai suplemen untuk manfaat kecantikan internal, meskipun penggunaan topikal lebih umum untuk tujuan kecantikan. Kandungan amino acid dan trace element dalam bubuk mutiara membantu memperbaiki tekstur kulit dan memberikan efek brightening yang alami. Rahasia kecantikan Tiongkok ini menawarkan alternatif alami yang telah terbukti efektif selama ribuan tahun. Yang membuatnya istimewa adalah pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada penampilan luar, tetapi juga kesehatan dan keseimbangan dari dalam. (nei,ist/dya)



Presiden Prabowo, ...dari hal 1

Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan untuk membersihkan kegiatan pertambangan ilegal, baik timah, batu bara, bauksit dan nikel. Ke depan, pertambangan ilegal itu akan diambil alih oleh negara.

Awalnya, Prabowo menyampaikan bahwa terdapat 1.000 tambang ilegal di wilayah Bangka Belitung. Ia memerintahkan TNI, Polri hingga Bea Cukai untuk melakukan operasi besar-besaran di wilayah tersebut untuk menyelamatkan keuangan negara.

Presiden Prabowo menjelaskan, operasi besar-besaran untuk menutup tambang timah ilegal dan memblokir jalur-jalur penyelundupan di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung akan dapat menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp22 triliun pada periode September-Desember 2025 bahkan Rp45 triliun sampai tahun 2026.

"Bangka Belitung cukup lama menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia. Itu terdapat 1.000 tambang ilegal. 1.000 tambang ilegal. Mulai tanggal 1 September kemarin, saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Bangka Belitung, menutup yang selama ini hampir 80 persen hasil timah diselundupkan. 80 persen timah, kita, kita tutup!" kata Presiden Prabowo di hadapan sejumlah pimpinan partai politik di Jakarta mengutip Antara, Senin (29/9/2025).

Presiden melanjutkan selama ini para penyelundup itu menggunakan berbagai siasat, untuk mengeluarkan hasil timah dari tambang-tambang ilegal ke luar Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Diantaranya menggunakan perahu-perahu kecil, sampai dengan kapal-kapal penumpang seperti kapal ferry. "Sekarang tutup, tidak bisa keluar, sampan pun tidak bisa keluar," tandasnya.

Dari kegiatan tambang ilegal itu, Prabowo mengindikasikan 80% hasil timah diselundupkan. "Selama ini hampir 80% hasil timah diselundupkan, 80% timah kita kita tutup, dan penyelundupnya macam-macam, ada yang pake kapal, ada yang pakai ferry, sekarang tutup tidak bisa keluar, sampai kapanpun tidak bisa keluar," ungkap dia.

"Kita perkiraan September, Oktober, November, Desember, bisa selamatkan Rp 22 triliun. Tahun depan kita perkiraan kita bisa selamatkan Rp 45 triliun," tegas Prabowo.

Nah, selain timah, baik nikel, batu bara hingga bauksit kata Prabowo juga terdapat tambang-tambang ilegal.

"Hampir semua terdapat tambang-tambang ilegal yang sangat besar dan banyak. ini saya perintahkan utk segera ditertibkan, dibersihkan tambang ilegal atau

diambil alih negara. Dan ini menjanjikan bahwa bila kita tegakan ini Insya Allah penerimaan negara jauh lebih besar, kebocoran kita tutup sehingga negara akan punya kemakmuran," tandas Prabowo.

Tidak hanya soal penyelundupan timah dan tambang timah ilegal, Presiden Prabowo juga menyoroti potensi mineral tanah jarang (rare earth) yang terkandung dalam limbah tambang timah di Bangka Belitung.

"Yang lebih merisaukan tetapi juga memberi harapan, ternyata limbahnya, limbahnya memiliki nilai yang sangat tinggi, karena limbahnya ternyata berisi mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth. Jadi, saudara-saudara, mungkin pejabat-pejabat kita tidak mengerti, dia kira limbah, padahal tanah jarang," jelas Presiden.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo memerintahkan Bea Cukai untuk merekrut ahli-ahli kimia sehingga mereka dapat mengidentifikasi kandungan tanah jarang dari material limbah bekas tambang timah.

"Ini saya sekarang perintahkan Bea Cukai itu harus merekrut beberapa ahli kimia supaya (bisa) ngecek. Dia lihat pasir, padahal pasir ini nilainya luar biasa. Di bidang lain juga sama, nikel, batu bara, bauksit, hampir semua terdapat tambang-tambang ilegal yang sangat besar dan banyak. Ini saya perintahkan untuk segera ditertibkan, dibersihkan tambang ilegal, atau diambil alih negara," tegasnya.

Presiden pun optimistis aksi "bersih-bersih" tambang ilegal itu dapat mencegah kebocoran-kebocoran uang negara, sehingga penerimaan negara dapat bertambah.

"Ini menjanjikan bahwa bila kita tegakkan ini InsyaAllah penerimaan negara jauh lebih besar, kebocoran kita tutup sehingga negara akan makmur," imbuh Presiden.

Untuk memastikan penindakan berjalan efektif dan menyeluruh, Presiden Prabowo telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, yang juga mencakup penertiban tambang ilegal di dalam kawasan hutan. Satgas ini dipimpin oleh Menteri Pertahanan, dengan Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri sebagai Wakil Ketua, menunjukkan keseriusan dan koordinasi antar lembaga negara.

Instruksi Presiden sangat jelas: penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu. Ancaman keras bahkan diarahkan kepada oknum petinggi militer atau kepolisian, baik yang masih aktif maupun pensiun, yang terbukti menjadi "beking" atau melindungi praktik tambang ilegal.

"Siapa pun yang terlibat, Jenderal, Perwira, atau mantan Jenderal, sikat! Hukum harus ditegakkan demi kepentingan rakyat dan negara," tegas Presiden.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, turut menegaskan bahwa pelaku tambang ilegal, baik yang beroperasi di kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) maupun di luar kawasan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), akan ditindaksesuai hukum.

Langkah tegas Presiden Prabowo ini mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Para legislator menyatakan kesiapan untuk mendukung regulasi yang memperkuat pengawasan, memberikan efek jera, dan memastikan seluruh aset dari tambang ilegal disita dan dikembalikan kepada negara.

Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik, menyebut pihaknya akan berdiri di belakang pemerintah guna mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto menutup tambang ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah.

Jamaludin mengatakan, dalam pidato pada acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Prabowo menjelaskan kebocoran kekayaan negara akibat tambang ilegal, salah satunya di Bangka Belitung (Babel).

"DPR akan berdiri di belakang pemerintah untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif," kata Jamaludin dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (29/9/2025).

Menurut Jamaludin, merujuk pada data kasus korupsi pada tata kelola timah di Babel, penambangan ilegal telah mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Sepanjang 2015 hingga 2022, negara dinyatakan menanggung kerugian Rp 300 triliun.

Dari jumlah itu, sebanyak Rp 271 triliun di antaranya terdiri dari kerugian lingkungan karena kawasan hutan dan non-kawasan hutan rusak. Hal yang sama juga terjadi pada sektor penambangan emas di Kalimantan Barat, di mana negara disebut menanggung kerugian hingga Rp 1,02 triliun.

Berkaca dari kasus-kasus tersebut, kata Jamaludin, tambang ilegal mengakibatkan kerugian ganda. "Pertambangan ilegal memukul dua hal sekaligus: keuangan negara dan keberlanjutan lingkungan. Tidak ada alasan untuk membiarkan praktik seperti ini terus berjalan," tutur Jamaludin.

Politikus Partai Golkar itu mendorong pemerintah menempuh tindakan tegas, seperti menyita seluruh aset pelaku tambang ilegal, termasuk mereka yang beroperasi di kawasan hutan.

Penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal, menurutnya, harus dilakukan tanpa pandang bulu sehingga negara bisa menguasai sumber daya yang dikuasai pihak-pihak tertentu secara melawan hukum.

Jamaludin mengaku, Komisi XII DPR RI yang membidangi tambang dan

energi akan mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan kementerian/lembaga terkait lebih aktif berkoordinasi. Tujuannya agar pengendalian tambang ilegal bisa sistematis dan tata kelola data perizinan, pengawasan lapangan, hingga aturan untuk menyita aset tambang ilegal lebih kuat.

"DPR siap mendukung regulasi yang memperkuat pengawasan, memberi efek jera bagi pelaku, dan mengembalikan seluruh aset tambang ilegal kepada negara," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyebutkan terdapat 1.063 titik aktivitas tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara minimal Rp300 triliun. "Kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan," kata Prabowo saat memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8/2025).

Dia meminta dukungan dari para legislator melindungi sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Serta, memberikan peringatan bagi para petinggi-petinggi di Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan mantan jenderal untuk tidak menjadi 'backing' para pelaku tambang ilegal.

Menanggapi hal tersebut, Manager Program Pusat Studi Hukum dan Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bayu Yusya berpandangan, kerugian besar akibat tambang ilegal tidak bisa hanya dipandang sebagai pelanggaran aturan semata, melainkan bentuk non-efektifnya sistem hukum tanah air.

"Hukum hanya akan berjalan efektif apabila tiga aspek utama, yakni struktur, substansi, dan kultur hukum, berfungsi dengan baik. Dalam kasus tambang ilegal, ketiga aspek itu justru menunjukkan kelemahan," ujar Bayu melalui keterangannya, Senin (18/8/2025).

Menurutnya, kelemahan paling nyata adalah koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kewenangan antara penegakan hukum (Gakkum) Kementerian ESDM, kepolisian, dan kejaksaan kerap tumpang tindih sehingga menimbulkan kebingungan dalam penindakan.

Pada hal, regulasi yang ada telah cukup memadai. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan telah mengatur sanksi pidana dan denda berat bagi pelaku penambangan tanpa izin. Namun, aturan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penindakan kerap hanya menasar pelaku lapangan, sementara aktor-aktor besar yang menjadi otak atau pelindung tambang ilegal masih luput dari jerat hukum.

"Hal ini menyebabkan aturan yang ada kehilangan daya paksa dan gagal menimbulkan efek jera," jelasnya dilansir hukumonline. (han,ais, ist,ant/lut)

“**S**ejauh ini kami melakukan pendataan. Dari data yang ada, kami temukan kurang lebih 79 korban. 79 korban itu terbagi di dua rumah sakit, RS Siti Hajar ada 45 korban, kemudian RSUD Sidoarjo ada 34,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Jules Abraham Abast kepada wartawan mengutip CNN Indonesia, Senin (29/9.2025) malam.

“Kami dapat informasi di RS Hajar yang 45, satu orang korban itu meninggal dunia dan saat ini dilakukan proses administrasi dan pemulangan (jenazah),” imbuhnya.

Belasan mobil ambulans didatangkan ke lokasi untuk mengevakuasi para korban yang langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Menurut pengakuan salah satu santri kelas tujuh Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al Khoziny bernama Wahid, ruang musala yang berada di lantai dua tersebut sempat bergoyang sebelum ambruk.

“Ketika masuk rakaat kedua bagian ujung musala ambruk, lalu merembet ke bagian lain gedung,” kata Wahid kepada Antara di Sidoarjo, Senin (29/9/2025).

Ia mengaku, berhasil menyelamatkan diri dan mengajak santri lain untuk segera mengevakuasi diri. Dari pengakuannya, para santri yang sedang melaksanakan shalat berjamaah tersebut berjumlah lebih dari 100 orang santri.

Terlihat, struktur bangunan lantai 3 dan 2 ambruk gedung yang terletak di bagian belakang pondok tersebut ambruk. Material semen dan kayu berjatuhan, menimpa bangunan paling dasar.

Ketua RT 07 RW 03 Desa Buduran, Munir mengatakan bahwa ia mendengar suara gemuruh dan merasakan getaran seperti gempa saat bangunan tersebut roboh.

“Saya posisi di rumah sepertinya ada suara gemuruh dan getaran. Seperti ada gempa, kaget saya pas keluar ada banyak debu. Waduh pondok,” kata Munir mengutip Kompas.com, Senin (29/9/2025).

Sebelumnya, pihak pondok meminta izin kepadanya untuk melakukan pengecoran. “Semalam izin ke saya bahwa akan ada proses pengecoran,” ungkap Munir.

Namun, ia tak mengetahui pasti lokasi atau titik pengecoran. Hanya saja, pengecoran dilakukan dengan proses penggilingan lewat kendaraan.

“Ngecor. Kurang tahu kalau soal material bangunan. Saya posisi di rumah memang semalem ada santri izin ke saya mau ada kendaraan yang ngecor. Enggak tahu posisinya di bagian mana,” ujarnya.

Sebelumnya, salah Satu Pengasuh Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, KH Abdus Salam Mujib mengatakan musala ambruk di

MUSALA PONPES DI SIDOARJO AMBRUK, 1 ORANG MENINGGAL DAN PULUHAN LUKA

Bangunan musala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk dan menimpa para santri yang sedang shalat Ashar berjamaah atau sekitar pukul 14.40 WIB, Senin (29/9/2025). Akibatnya satu korban meninggal dunia dan 78 lainnya luka dan harus menjalani perawatan medis.



Sejauh ini kami melakukan pendataan. Dari data yang ada, kami temukan kurang lebih 79 korban. 79 korban itu terbagi di dua rumah sakit, RS Siti Hajar ada 45 korban, kemudian RSUD Sidoarjo ada 34,”

JULES ABRAHAM ABAST
Kabid Humas Polda Jatim,

ponpesnya masih dalam tahap pembangunan, dan proses pengecoran atap, pada Senin (29/9/2025) pagi.

Mujib mengatakan, pengecoran itu dilakukan di lantai paling atas bangunan atau tepatnya bangunan atap dan bagian itu lah yang jebol.

“Ini pengacoran yang terakhir saja. Itu jebol. Ya hanya itu,” kata Mujib.

Meski dalam proses pembangunan, dia mengaku musala itu sudah difungsikan untuk salat berjamaah. Tapi dia tak mengetahui berapa santri yang saat itu berada di musala.

“Ya, mestinya semua (santri salat). Cuma kan waktu ashur itu kan banyak yang istirahat. Banyak yang masih kegiatan keluar musala itu tadi,” ujarnya.

Ia pun menduga, ambruknya musala itu karena penopang bangunan tak kuat menahan material pengecoran. “Sepertinya penopang cor itu tidak kuat. Jadi seperti menopang ke bawah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan duka cita mendalam atas musibah robohnya bangunan musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Senin (29/9/2025).

“Saya turut berduka cita yang

mendalam atas musibah yang menimpa keluarga besar Ponpes Al Khoziny. Semoga para korban yang mengalami luka segera pulih kembali, dan Allah SWT memberikan kekuatan serta kesabaran bagi seluruh santri, pengasuh, serta keluarga yang terdampak,” ujar Gus Muhaimin.

Hingga saat ini, jumlah pasti korban jiwa maupun luka masih menunggu proses evakuasi. Gus Muhaimin meminta masyarakat untuk tetap tenang sambil bersama-sama mendoakan keselamatan para santri dan keluarga besar ponpes.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Gus Muhaimin menginstruksikan kader PKB di Jawa Timur, khususnya wilayah Sidoarjo, untuk segera turun membantu penanganan musibah.

“Saya minta kader PKB hadir langsung di lapangan, bantu tenaga maupun kebutuhan mendesak para santri terdampak. Jika diperlukan, segera bangun dapur umum, kerahkan tenaga medis, dan pastikan kebutuhan logistik para korban terpenuhi,” tegasnya.

Gus Muhaimin menegaskan bahwa pesantren merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama, tidak hanya sebagai tempat pendidikan, tetapi juga pusat pembinaan moral

dan spiritual generasi muda. “Karena itu, saya berharap musibah ini dapat ditangani secara gotong royong, cepat, dan tepat,” pungkasnya. (ais,rls/lut)